

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengetahuan dalam bidang pendidikan menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai dan sikap pada orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Pemerhati, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan telah berusaha merancang dan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal bagi semua anak, sehingga diharapkan semua warga di negara ini memperoleh pendidikan yang memadai.

Nilai-nilai pendidikan yang ditawarkan lebih menghargai dan memberikan kebebasan individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan individu itu sendiri. Pengembangan potensi pun disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing individu.

Pendidikan khususnya dalam pendidikan kebutuhan khusus, dalam beberapa waktu ini telah banyak mensosialisasikan paradigma inklusi dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Di mana siswa-siswa berkebutuhan khusus tidak diharuskan lagi bersekolah di sekolah-sekolah khusus, akan tetapi mereka diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah reguler bersama siswa-siswa lain pada umumnya.

Selama ini pelayanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus terbelenggu dalam suatu tempat yang terasing dari dunia luar, tidak sedikit pengorbanan selama berada dalam keterasingan itu. Salah satunya menjadikan siswa-siswa tersebut merasa sangat berbeda dengan lingkungannya, sehingga mereka kurang memiliki rasa percaya diri ketika berada di dunia luar.

Inklusi, telah membuka belenggu dan memberi secercah harapan kehidupan baru bagi pelayanan pendidikan bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Namun demikian, pelaksanaan inklusi tidak serta merta dapat terwujud dengan baik tanpa didukung faktor-faktor lain dalam pengembangannya. Seperti yang dikemukakan Skjorten (2003:50) bahwa pelaksanaan inklusi membutuhkan:

1. Perubahan hati dan sikap
2. Reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran, dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan
3. Redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia
4. Redefinisi peran SLB yang ada, misalnya dapatkah sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif?
5. Penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas, sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan
6. Pembentukan, peningkatan, dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasihat.

Point-point di atas menunjukkan perlunya kerjasama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Inklusi tidak cukup dengan sosialisasi dan pembuatan kebijakan-kebijakan saja, apalah artinya semua itu tanpa dijiwai semangat untuk melaksanakannya. Hal yang paling mendasar adalah bahwa inklusi harus terinternalisasi terlebih dulu dalam diri individu yang akan mengembangkannya.

Keberadaan siswa-siswa berkebutuhan khusus telah dapat dijumpai di sekolah-sekolah reguler pada saat ini. Penyandang tunarungu, salah satu siswa berkebutuhan khusus yang telah ditemukan di sekolah-sekolah reguler sebagai bukti dari terselenggaranya pendidikan inklusif yang telah digulirkan.

Hallahan dan Kauffman (1988) mengemukakan bahwa kehilangan pendengaran bagi penyandang tunarungu mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya, dampak yang paling berat dari kehilangan pendengaran adalah keterbatasan bahasa, bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan oleh

masyarakat mendengar di mana penyandang tunarungu berada.

Mengenai kemampuan intelektual penyandang tunarungu terdapat kontroversi, menurut Vygotsky (Hallahan dan Kauffman: 1988) bahwa penyandang tunarungu mengalami keterbatasan pula dalam kemampuan konseptual, karena terdapat hubungan antara berfikir dan bahasa. Vygotsky berpendapat bahwa kemampuan awal anak-anak berbicara/berbahasa dijadikan sebagai inti dari kemampuan berbicara/berbahasa dan inti kemampuan berbicara/berbahasa disamaartikan dengan berfikir kognitif, sehingga perkembangan intelektual paralel dengan perkembangan bahasa. Jika seseorang mengalami ketunarunguan maka orang itu juga mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif.

Sedangkan menurut Furth (Hallahan dan Kauffman: 1988) bahwa berfikir tidak berhubungan/tergantung pada kemampuan bahasa. Pada beberapa eksperimen menunjukkan bahwa ketidakmampuan penyandang tunarungu dalam mengerjakan tugas lebih disebabkan karena kurang stimulasi dan ketidaktahuan terhadap instruksi. Artinya apabila instruksi yang digunakan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh penyandang tunarungu dalam hal ini isyarat, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sependapat dengan Furth, Sullivan mengemukakan bahwa tidak ada masalah dalam skor tes intelegensi bila dalam tes tersebut menggunakan bahasa isyarat.

Prestasi akademik penyandang tunarungu cenderung rendah, hal tersebut dikarenakan dalam pencapaian prestasi akademik menitikberatkan pada kemampuan membaca. Furth (Hallahan dan Kauffman: 1988) mengemukakan hanya sebagian kecil penyandang tunarungu yang memahami buku teks sekolah/college. Selain itu berdasarkan penelitian Trybus dan Karchmer (Hallahan dan Kauffman: 1988) pada 6.871 anak tunarungu yang dimuat dalam edisi Stanford Achievement Test (SAT-HI)

menemukan penyandang tunarungu memiliki prestasi yang sangat parah dalam membaca. Pada usia 20 tahun, setengah dari siswa tunarungu dapat membaca pada tingkat kemampuan membaca kelas IV. Prestasi siswa tunarungu dalam aritmatik, kurang dari setengah siswa tunarungu mampu mengerjakan tugas kelas VIII pada usia 20 tahun. Sependapat dengan pernyataan di atas Jensema (Kirk dan Galagher: 1989) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang parallel antara tingkat kehilangan pendengaran dengan kemampuan membaca, semakin besar tingkat kehilangan pendengaran maka akan semakin parah kemampuan membacanya. Disebutkan pula bahwa antara usia 8-18 tahun, perkembangan kosa kata siswa tunarungu sebanyak kosa kata siswa pada usia TK dan kelas II. Hal tersebut telah terbukti pula di Indonesia dengan adanya penelitian yang dilakukan Yuwati (1998:87) yang mengemukakan bahwa "...kemampuan berbahasa siswa tunarungu di kelas VI SDLB setara dengan kemampuan berbahasa kelas IV SD siswa yang mendengar".

Perkembangan kepribadian dan sosial seseorang dipengaruhi adanya interaksi dan komunikasi dengan lingkungan. Begitupula halnya dengan penyandang tunarungu, keterbatasan dalam komunikasi yang dimilikinya dapat menimbulkan kesalahpahaman, curiga pada diri penyandang tunarungu. Semakin berat tingkat kehilangan pendengaran, semakin sulit komunikasi dengan lingkungan mendengar yang menimbulkan kesulitan tingkah laku dan penyesuaian sosial. Tetapi bila lingkungan dapat memahami dan menerima keterbatasannya, penyandang tunarungu tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam perkembangan kepribadian dan sosialnya.

Sampai saat ini layanan pendidikan bagi penyandang tunarungu berada pada setting sekolah khusus yaitu Sekolah Luar Biasa bagian B. Di lain pihak sekolah reguler pun cenderung belum menerima keberadaan siswa tunarungu dengan berbagai

alasan, salah satu contoh alasannya adalah ketidakmampuan mengajar karena tidak dapat berkomunikasi dan memahami tentang ketunarunguan.

Dari hasil studi pendahuluan di SD "A" dan SD "B" ditemukan siswa tunarungu yang telah mengikuti pembelajaran bersama siswa-siswa mendengar lainnya. Siswa tunarungu di SD "A" berjumlah tiga orang yaitu AS kelas satu, A kelas empat, dan J kelas lima. Tingkat kehilangan pendengaran AS pada telinga sebelah kanan 30 dB, telinga kiri 70 dB. AS mengalami peningkatan tingkat kehilangan pendengaran karena pada saat lahir, kehilangan pendengaran telinga kanan sebesar 110 dB, telinga kiri 110 dB. Di kelas empat, A memiliki tingkat kehilangan pendengaran pada telinga sebelah kanan 80 dB, telinga kiri 70 dB. Sedangkan J di kelas lima mempunyai tingkat kehilangan pendengaran yang sama seperti A. Di SD "B", siswa tunarungu berjumlah satu orang, duduk di kelas tiga, dengan tingkat kehilangan pendengaran telinga kanan 110 dB, telinga kiri 110 dB.

Dengan telah diterimanya siswa tunarungu di SD "A" dan SD "B", sebagai konsekuensi kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola sekolah dalam hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunarungu. Tetapi kenyataannya penerimaan siswa tunarungu di SD "A" hanya berdasarkan kasih semata, sedangkan penerimaan siswa tunarungu di SD "B" dikarenakan kekurangan siswa.

Dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui "Bagaimana pihak sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di SD "A" dan SD "B"?"

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, yang menjadi fokus penelitian ini adalah: “Bagaimana pihak sekolah melaksanakan pengelolaan dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di SD “A” dan SD “B”?”

Secara rinci dapat dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak sekolah melakukan perencanaan dalam bidang kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler?
2. Bagaimana pihak sekolah melakukan pengorganisasian dalam bidang kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler?
3. Bagaimana pihak sekolah melakukan pengarahan dalam bidang kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler?
4. Bagaimana pihak sekolah melakukan pengawasan dalam bidang kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler?

C. Konsep Dasar

Penelitian ini mempunyai landasan konsep mengenai pengelolaan sekolah dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler yang menuju

sekolah inklusif.

Sebelum lebih lanjut mengupas tentang pengelolaan, banyak pandangan yang berbeda dalam memaknai istilah pengelolaan, manajemen dan admistrasi. Pada penelitian ini, peneliti menyamaartikan istilah tersebut.

1. Pengelolaan sekolah

Rukmana dan Rahyasih (1994:71) mengemukakan bahwa “ Pengelolaan sekolah adalah pengelolaan pada beberapa unit pekerjaan yang dikelola oleh beberapa petugas yang diberi wewenang oleh kepala sekolah dan mereka bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah”.

Unit-unit pekerjaan di sekolah meliputi kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus (Depdiknas,2004:10).

Agar tercapainya tujuan organisasi dalam hal ini sekolah maka diperlukan proses dalam pengelolaan diantaranya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Stoner (Handoko, 1984:8) bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan sekolah dalam memutuskan seperangkat tujuan dan cara pencapaian tujuan dalam aspek kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus di sekolah dasar dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah dasar.

Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan



sekolah dalam menyusun dan membentuk hubungan kerjasama antara kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah dasar.

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan sekolah dalam mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi personil kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu.

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan sekolah dalam menetapkan standar pelaksanaan, tujuan perencanaan, menentukan dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi dari aspek kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu.

Aspek pengelolaan kurikulum meliputi: modifikasi kurikulum, mengatur pelaksanaan penyusunan program pembelajaran, mengatur pelaksanaan penyusunan program ekstra kurikuler, mengatur pelaksanaan penilaian, mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.

Aspek pengelolaan tenaga pendidik/guru meliputi penerimaan guru pembimbing khusus, pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antar tenaga kependidikan khususnya antara guru reguler dan guru pembimbing khusus dalam memberikan pendidikan kebutuhan khusus bagi siswa.

Aspek pengelolaan kesiswaan meliputi penerimaan siswa baru, termasuk di dalamnya identifikasi, asesmen dan penempatan siswa, pengelompokan belajar siswa.

Aspek pengelolaan sarana prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan terhadap kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana yang memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar berkaitan dengan keberadaan siswa tunarungu.

Aspek pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi pemberian informasi kepada masyarakat mengenai program-program sekolah khususnya program bagi siswa tunarungu, hubungan dengan tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah.

Aspek pengelolaan layanan khusus meliputi layanan yang diberikan guru pembimbing khusus dalam pengelolaan kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tunarungu.

Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan sekolah dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap aspek kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, kerjasama sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Peneliti tidak membahas aspek keuangan karena merasa kurang memungkinkan untuk mengupas sesuatu hal yang dianggap sensitif dan di luar kemampuan peneliti.

2. Siswa tunarungu

Siswa tunarungu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tiga siswa tunarungu di SD "A" yaitu AS kelas satu, A kelas empat, dan J kelas lima. Tingkat kehilangan pendengaran AS pada telinga sebelah kanan 30 dB, telinga kiri 70 dB. AS mengalami peningkatan tingkat kehilangan pendengaran karena pada saat lahir, kehilangan pendengaran telinga kanan sebesar 110 dB, telinga kiri 110 dB. Di kelas empat, A memiliki tingkat kehilangan pendengaran pada telinga sebelah kanan 80 dB, telinga kiri 70 dB. Sedangkan siswa J di kelas lima mempunyai tingkat kehilangan pendengaran yang sama seperti A.



3. Menunjang keberadaan siswa tunarungu di sekolah reguler, yang dalam penelitian ini bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dilakukan kepala sekolah bertujuan memberikan kelancaran situasi sekolah bagi siswa tunarungu-siswa tunarungu yang berada di SD "A" dan SD "B".
4. Sekolah reguler yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekolah dasar umum yang merupakan lembaga pendidikan formal, dimana peserta didik pada umumnya siswa-siswa yang tidak memiliki kelainan, baik fisik dan atau mental.
5. Menuju sekolah inklusif

Sistem pendidikan di sekolah reguler yang berkembang saat ini seringkali mengakibatkan timbulnya permasalahan yang sangat kompleks. Tidak sedikit siswa yang memiliki prestasi rendah berpotensi putus sekolah, dikarenakan siswa tersebut tidak mencapai kriteria minimal siswa-siswa pada umumnya. Kondisi siswa semacam ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain oleh adanya kelainan fisik, mental, sosial dan/atau emosionalnya sehingga mengakibatkan hambatan belajar. Disamping itu, juga faktor lingkungan atau di luar diri anak, seperti ekonomi, budaya, politik dan bencana alam yang dapat mengakibatkan hambatan belajar. Dengan demikian, prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pada akhirnya siswa semacam ini sering di sebut bodoh atau terbelakang mental yang pelayanan pendidikannya harus di sekolah khusus (SLB/SDLB), karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama dengan siswa lain pada umumnya. Mereka harus dilayani dengan metode, materi dan penilaian secara khusus bahkan menggunakan alat bantu khusus untuk menunjang kegiatan belajarnya.

Cara semacam ini dilakukan, karena di sekolah reguler masih memandang bahwa siswa-siswa yang memiliki hambatan belajar akan mengganggu sistem pelayanan pendidikan yang ada, seperti menyamakan kemampuan semua siswa

sehingga guru menggunakan metode klasikal tanpa melihat perbedaan kemampuan masing-masing siswa. Begitu pula materi yang diberikan bagi semua siswa tidak berbeda, padahal ada diantara siswa yang belum menguasai materi sebelumnya. Penilaian yang diberikan juga seringkali menggunakan sistem normatif.

Namun seiring dengan derasnya informasi dan perkembangan pengetahuan dan teknologi berdampak kepada pandangan terhadap pendidikan yang semakin demokratis sehingga mengalami reformasi sistem pendidikan. Melalui program pemerintah telah dicanangkan program pendidikan terpadu, dimana siswa berkelainan yang memiliki kemampuan yang sama dengan siswa lain pada umumnya dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Mereka belajar bersama-sama dengan siswa lain pada umumnya dengan materi, metode dan sistem penilaian yang tidak berbeda. Dengan sistem terpadu ini, siswa berkelainan harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Sistem pendidikan terpadu masih membatasi kesempatan belajar di sekolah reguler bagi siswa-siswa berkelainan yang memiliki kemampuan setara dengan siswa lain pada umumnya.

Perkembangan paradigma pendidikan berikutnya yang sedang dicanangkan dan diujicobakan saat ini adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan pengembangan dari pendidikan terpadu, dimana siswa berkebutuhan khusus diberi kesempatan bersekolah di sekolah reguler terdekat tanpa memandang jenis dan tingkat kelainan. Pendidikan inklusif merupakan strategi yang dapat menjangkau semua siswa dalam sistem pendidikan di sekolah. Sekolah yang berorientasi inklusi merupakan alat untuk memerangi sikap diskriminasi, dengan sistem yang mengupayakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa, memberi dukungan pemenuhan kebutuhan setiap siswa dengan karakteristik inklusif sebagai berikut: (1) dapat melibatkan semua siswa, (2) menciptakan interaksi yang

kondusif, (3) menggunakan sarana yang mendukung pembelajaran, (4) kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan siswa, (5) kemampuan guru berinteraksi dengan siswa, (6) mendorong terjadinya interaksi diantara siswa-siswa, (7) mengupayakan kelas menjadi tempat yang menyenangkan, (8) menyiapkan tugas disesuaikan untuk siswa, (9) memupuk tanggung jawab kepada siswa itu sendiri, (10) memberikan penghargaan atas aspek yang positif dari siswa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan sekolah dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di SD "A" dan SD "B".

Secara khusus peneliti akan mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak sekolah dalam merencanakan kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus sehingga menunjang keberadaan siswa tunarungu.
- b. Pihak sekolah dalam mengorganisasikan kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus sehingga menunjang keberadaan siswa tunarungu.
- c. Pihak sekolah dalam mengarahkan kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus sehingga menunjang keberadaan siswa tunarungu.
- d. Pihak sekolah dalam mengawasi kurikulum, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus sehingga menunjang keberadaan siswa tunarungu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Sekolah Dasar, dapat memberikan masukan pada kepala sekolah dalam meningkatkan pengelolaan sekolah yang menunjang keberadaan siswa-siswa berkebutuhan khusus.
- b. Peneliti, dapat memahami potensi dasar dari SD “A” dan SD “B” dalam melakukan pengelolaan sekolah sehingga menunjang keberadaan siswa tunarungu, dimana hal itu merupakan modal dasar pengembangan pendidikan inklusif.
- c. Dinas Pendidikan khususnya Sub Dinas Pendidikan Luar Biasa, kondisi SD “A” dan SD “B” hendaknya dapat dijadikan acuan dasar dalam mengembangkan layanan pendidikan kebutuhan khusus.

E. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengutamakan proses bagaimana data dapat diperoleh sehingga data tersebut menjadi akurat dan layak digunakan dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (1996) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan proses daripada hasil, menganalisis fakta di lapangan secara alamiah, dan berusaha menemukan teori-teori dasar yang bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara fleksibel artinya pedoman yang dibuat hanya garis-garis besarnya saja.

Maksudnya agar dapat menggali lebih dalam hal-hal yang dianggap memiliki peranan penting dalam mengungkap tentang pengelolaan yang dilakukan sekolah dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu. Hal itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bila memang memungkinkan lebih dikembangkannya pertanyaan-pertanyaan dalam proses wawancara, maka peneliti akan mengungkapnya tanpa keluar dari fokus penelitian. Observasi digunakan untuk melihat pengelolaan seperti apa yang telah dilakukan oleh sekolah dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu. Studi dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai bukti bahwa pengelolaan yang menunjang keberadaan siswa tunarungu telah dilaksanakan oleh sekolah.

Dengan digunakannya beberapa metoda dalam penelitian ini, diharapkan data yang terkumpul lebih akurat dan bervariasi, sehingga akan lebih memperkaya isi dari penelitian ini.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu studi kasus eksploratoris. Studi kasus menurut Yin (Bungin, 2003: 20) ‘...bertujuan menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, batas antara konteks dan fenomena tidak tampak tegas, dan memerlukan multi sumber bukti dimanfaatkan’. Pada halaman selanjutnya Yin (Bungin, 2003:21) menyebutkan pula bahwa ‘...studi kasus berupaya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana’. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini pun bertujuan mengungkap dan menjelaskan pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah dalam menunjang keberadaan siswa tunarungu di SD “A” dan SD “B”, di mana data-data tersebut diperoleh dari jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana yang bersumber dari bukti-bukti berbagai informan di lapangan.

F. Lokasi penelitian

Fenomena yang terjadi berada di lokasi sekolah dasar yaitu di SD "A" yang terletak di kota Bandung dan SD "B" di kota Cimahi. Kasus penelitian ini adalah kedua sekolah tersebut, dengan maksud memberikan variasi data sesuai dengan kondisi kedua SD tersebut yang telah menerima keberadaan siswa tunarungu.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah selaku seorang manajer atau pengelola suatu organisasi pendidikan dalam hal ini adalah sekolah dasar. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai kewenangan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan yang diselenggarakan sehingga dapat menunjang keberadaan siswa tunarungu.

Karena informasi yang diperoleh dari kepala sekolah kurang memuaskan, akhirnya informan berkembang dengan menetapkan guru/wali kelas siswa tunarungu untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan terhadap siswa tunarungu.

